Copyright © the author(s)

Analisis Lanskap Linguistik Kota Sorong: Kebijakan Bahasa dan Dinamika Bahasa di Papua Barat Daya

Mohamad Rizal Taryono[1], Aswad Muhdar[2], Saiful Ichwan[3], Nurfaddilah Wali Sampo[4]
[1,2,3,4] Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Mohamad Rizal Taryono
rizaltaryono@um-sorong.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji lanskap linguistik (LL) Kota Sorong, ibu kota provinsi baru Papua Barat Daya, dengan fokus pada bagaimana bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing, dan bahasa daerah (*indegenous language*) berkompetisi pada penanda ruang publik. Dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif yang diperkuat analisis kuantitatif sederhana, penelitian ini mengumpulkan 80 tanda fotografi dari empat zona strategis. Data dianalisis menggunakan teori fungsi informasional-simbolik Landry dan Bourhis (1997), aktor tanda *top-down/bottom-up* Ben-Rafael dkk. (2006), serta kebijakan bahasa Shohamy dan Gorter (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanda monolingual mendominasi (51,25%), diikuti oleh bilingual (37,5%) dan multilingual (11,25%), dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa tunggal yang paling banyak muncul, disusul oleh bahasa Inggris. Tanda-tanda yang dibuat oleh pemerintah (*top-down*) umumnya patuh terhadap UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019 dengan mengutamakan bahasa Indonesia, sementara tanda-tanda komersial milik swasta (*bottom-up*) lebih sering menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lain untuk membangun citra modern dan menarik konsumen. Bahasa Moi dan Sentani hadir pada beberapa tanda tetapi tidak muncul secara mandiri dan cenderung disandingkan dengan bahasa Indonesia sehingga menunjukkan rendahnya visibilitas bahasa lokal di ruang publik. Temuan ini mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan bahasa nasional dan praktik penggunaan bahasa di masyarakat, terutama di sektor komersial dan pariwisata, serta menegaskan perlunya tata kelola bahasa yang lebih kuat untuk melindungi bahasa lokal di tengah transformasi administratif dan urban Kota Sorong yang berlangsung cepat.

Kata Kunci: *lanskap, linguistik, kebijakan, visibilitas, Sorong*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara multilingual yang memiliki 718 bahasa dan Papua menjadi wilayah dengan tingkat keragaman bahasa daerah tertinggi, yaitu 428 bahasa (Badan Bahasa, 2019; Budiono, 2022). Di Papua Barat Daya, Kota Sorong menjadi kota yang multietnis dan multibahasa yang terdiri atas 33 etnis yang menunjukkan keberagaman budaya dan bahasa (Taryono dkk., 2025). Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa asing dan bahasa daerah lain, wilayah ini dihuni oleh puluhan bahasa lokal (*indigeneous language*), yaitu Moi, Sentani, Kokoda, Maybrat, Tehit, Karon, dan Ayamaru, serta bahasa Melayu Papua (bahasa Indonesia dialek Papua) yang berfungsi sebagai *lingua franca* antaretnis (Badan Bahasa, 2019; Budiono, 2022; Taryono dkk.,

2024). Akan tetapi, temuan mutakhir menunjukkan bahwa bahasa Moi mengalami pergeseran dengan tingkat pemertahanan yang rendah (Ibrahim dkk., 2023).

Kota Sorong menampilkan kontestasi penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa lokal, bahasa Melayu Papua, dan bahasa daerah lain di ruang publik. Ekologi bahasa yang makin dinamis ini memperkaya dan mempertajam visibilitas bahasa di ruang publik. Kompleksitas ekologi bahasa inilah yang menegaskan urgensi akademik penelitian ini, yaitu kajian yang mampu memotret secara empiris interaksi dan kompetisi antara bahasa mayoritas (Indonesia, Inggris) dan bahasa minoritas (Moi dan bahasa daerah lain) di ruang publik.

Dalam lanskap linguistik (LL), ruang publik dipahami sebagai medan bahasa yang tidak netral. Sejak pertama kali dirumuskan oleh Landry dan Bourhis (1997), LL merupakan representasi visual bahasa pada papan nama, rambu, spanduk, dan tanda komersial yang memuat fungsi informasional (memberi petunjuk/layanan) dan simbolis (membangun identitas, prestise, dan relasi kuasa) (Jiao & Singh., 2024; Savski, 2021). Studi LL merupakan cabang baru dalam sosiolinguistik dan semiotika. LL berfokus pada analisis representasi bahasa yang terlihat di ruang publik, serta mengeksplorasi aspek sosial-budaya dan politik dalam suatu komunitas (Gorter dkk., 2012).

Penelitian LL dapat menunjukkan bahasa mana yang diberi visibilitas, bahasa mana yang dikesampingkan, dan apa motivasi di balik pilihan tersebut (Backhaus, 2007). Sementara itu, visibilitas suatu bahasa mencerminkan status, kekuasaan, dan identitas kelompok sosial dalam masyarakat multibahasa (Du Plessis, 2011; Tufi dkk., 2010; Ben-Rafael dkk., 2006). Penelitian LL bertujuan untuk memahami motif, penggunaan, ideologi, ragam bahasa, serta bentuk-bentuk kontestasi dari berbagai wujud bahasa sebagaimana ditampilkan di ruang-ruang publik (Gorter, 2018).

Riset LL mutakhir di Indonesia menunjukkan pola yang relatif konsisten, yakni bahasa Indonesia cenderung dominan pada penanda resmi (*top-down*), sedangkan bahasa Inggris menguat pada ranah komersial (*bottom-up*) sebagai strategi modernitas/jenama. Namun, fenomena ini berimplikasi pada rendahnya visibilitas bahasa lokal (Sakhiyya & Martin-Anatias, 2023; Rohmah dkk., 2024; Putra dkk., 2024).

LL pada ruang publik tidak hanya memperlihatkan keberagaman bahasa, tetapi juga menunjukkan adanya dominasi dan kontestasi antarbahasa (Benu dkk., 2023). Penelitian LL di beberapa tempat di Indonesia (Artawa dkk., 2020; Mulyawan, 2021; Mulyawan dan Geraghty, 2020) serta di negara-negara non-Inggris seperti Tailan (Savski, 2021) dan Malaysia (Wang dan Xu, 2018) menunjukkan bahwa bahasa daerah merupakan bahasa yang paling terpinggirkan dibandingkan dengan bahasa asing. Sejalan dengan temuan tersebut, berbagai penelitian LL yang dilakukan di Indonesia (Andriyanti, 2019; Fakhiroh dan Rohmah, 2018; Mulyawan, 2020; Sakhiya dan Martin-Anatias, 2020) menunjukkan bahwa bahasa daerah mengalami marginalisasi yang lebih besar dibandingkan bahasa asing di ruang publik.

Selain itu, penelitian LL mutakhir menunjukkan fokus pada kota mapan dan kawasan wisata, misalnya di Australia (Cai, 2025), Tiongkok (Wang, 2025), Malaysia (Jiao & Singh, 2024), serta di Indonesia seperti Lembang-Bandung (Mubarok dkk., 2024) dan Manokwari (Febriansyah dkk., 2025), termasuk kajian bahasa minoritas (Cenoz & Gorter, 2006; Zhang dkk., 2024). Namun, belum pernah meneliti kota yang baru mengalami perubahan status administratif menjadi ibu kota.

Penelitian LL di Papua terkonsentrasi di Manokwari dan Biak. Adapun penelitian di Kota Sorong masih berfokus pada vitalitas bahasa dan pergeseran bahasa (Ibrahim dkk., 2023, 2024; Taryono & Tambunan, 2024; Taryono dkk., 2025). Namun, bagaimana bahasa-bahasa ini berkompetisi di ruang publik belum pernah diteliti secara sistematis.

Dengan demikian, kajian LL yang sistematis diperlukan untuk menyediakan data tata kelola bahasa yang lebih akuntabel dan kontekstual (Cai, 2025).

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. (1) Bagaimana pola distribusi bahasa pada penanda di ruang publik Kota Sorong? (2) Bagaimana fungsi informasional dan simbolis penanda bahasa tersebut dalam merefleksikan identitas sosiokultural Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi baru? (3) Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada LL Kota Sorong sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019?

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bahasa apa saja yang muncul sebagai monolingual, bilingual, atau multilingual, fungsinya, serta siapa aktor dibalik pembuat tanda pada LL Kota Sorong. Dalam konteks wilayah multibahasa dan multietnis, penelitian ini mendeskripsikan pola dominasi bahasa dalam LL Kota Sorong dan motivasi di baliknya. Selain itu, penelitian ini menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dan hubungannya dengan kebijakan bahasa.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang diperkuat analisis kuantitatif yang berbentuk studi kasus pada empat zona strategis Kota Sorong: (1) zona pemerintahan, yaitu kantor gubernur, kantor wali kota, dan instansi vertikal; (2) zona transportasi dan pariwisata, yaitu Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Pelabuhan PELNI, dan kawasan hotel; (3) zona komersial dan pasar, yaitu Pasar Remu dan pusat perbelanjaan; serta (4) zona historis dan budaya, yaitu Pulau Doom. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi kedalaman interpretasi semiotik-kualitatif sekaligus memberikan gambaran distribusi bahasa secara terukur.

Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan sosiolinguistis LL. Adapun teori LL yang digunakan adalah teori Landry dan Bourhis (1997) untuk mengungkap fungsi informasional dan simbolik, teori Ben-Rafael dkk. (2006) untuk klasifikasi pelaku pembuat tanda *top-down* vs. *bottom-top*, dan teori Shohamy dan Gorter (2009) dan Shohamy (2015) untuk menjelaskan relasi antara LL dan kebijakan bahasa di ruang publik dalam masyarakat multibahasa.

Dalam studi LL, Spolsky dan Cooper (dalam Shohamy dan Groter, 2008) merumuskan delapan taksonomi tanda sebagai data penelitian LL, yaitu tanda jalan, tanda iklan, peringatan atau larangan, nama bangunan, tanda informasi, tanda peringatan, objek, dan grafiti. Dalam penelitian ini, hanya empat jenis tanda yang digunakan sebagai sumber data, yaitu tanda jalan, tanda informasi, tanda peringatan, dan papan nama toko. Adapun data penelitian ini berupa foto tanda/penanda bahasa di ruang publik beserta metadatanya.

Teknik penyediaan data dilakukan dengan (1) dokumentasi fotografi sistematis dengan ponsel pada koridor dan titik yang ditetapkan per zona, yang dilengkapi metadata tanggal, lokasi, jenis tanda, aktor pembuat tanda *top-down* (otoritas/instansi/pemerintah) dan *bottom-up* (swasta/individu), dan konteks; (2) Observasi partisipatif terbatas untuk mencatat konteks sosial tempat (fungsi, keramaian, target audiens); dan (3) Analisis dokumen kebijakan sebagai dasar audit kepatuhan. Hult (dalam Shohamy dan Gorter, 2009) dan Puzey (2016) menyatakan bahwa data yang digunakan dalam analisis LL berdasarkan fotografi dan analisis visual yang dapat menangkap isu bahasa di suatu ruang.

Data kemudian dianalisis melalui tahapan berikut: (1) seleksi dan reduksi data (menghapus duplikasi, memastikan keterbacaan tanda), (2) pengodean *codebook* (aktor tanda, bahasa, pola LL, fungsi tanda, kepatuhan, kebakuan), (3) analisis kuantitatif

deskriptif (tabulasi frekuensi dan persentase pola bahasa), (4) hierarki tampilan bahasa, dan (5) analisis kebijakan (kesenjangan regulasi-praktik multilingual). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, *member-checking* terhadap informan kunci, serta audit trail proses pengodean.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas 80 tanda fotografi sebagai data. Penggunaan bahasa pada LL di Kota Sorong diklasifikasikan menjadi monolingual, bilingual, dan multilingual. Kuantifikasi data tampak pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jenis Tanda LL di Kota Sorong

Bahasa	Variasi Bahasa	Jumlah Tanda	Persentase (%)
Monolingual	Bahasa Indonesia	18	22.5
	Bahasa Inggris	10	12.5
	Bahasa Arab	5	6.25
	Bahasa Jepang	2	2.5
	Bahasa Jawa	2	2.5
	Bahasa Melayu Papua	2	2.5
	Bahasa Mandarin	2	2.5
Bilingual	Indonesia+Inggris	8	10
	Inggris+Mandarin	2	2.5
	Indonesia+Moi/*indigenous language*	5	6.25
	Indonesia+Jepang	2	2.5
	Indonesia+Melayu Papua	5	6.25
	Indonesia+Arab	2	2.5
	Indonesia+Jawa	2	2.5
	Indonesia+Ibrani	2	2.5
	Indonesia+Minang	2	2.5
Multilingual	Indonesia+Inggris+Melayu Papua	5	6.25
	Indonesia+Inggris+Arab	2	2.5
	Indonesia+Inggris+Jepang	2	2.5
	Jumlah	**80**	**100**

Hasil perhitungan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa LL Kota Sorong didominasi oleh penggunaan penanda Monolingual (tunggal) dengan total 41 tanda (51,25%), diikuti oleh penanda Bilingual (dua bahasa) sebanyak 30 tanda (37,5%), dan penanda Multilingual (lebih dari dua bahasa) sebanyak 9 tanda (11,25%). Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling dominan (*monolingual*) dengan persentase sebesar 22,5%, disusul oleh Bahasa Inggris sebesar 12,5%, serta Bahasa Arab sebesar 6,25%.

Pada kelompok variasi bahasa gabungan, pola bilingual Indonesia+Inggris menjadi kombinasi yang paling dominan dengan persentase 10%, disusul oleh variasi Indonesia+Moi dan Indonesia+Melayu Papua yang masing-masing 6,25%. Kehadiran bahasa daerah seperti Moi dan Melayu Papua, serta bahasa asing seperti Jepang, Mandarin, Arab, dan Ibrani, mencerminkan heterogenitas budaya, ekspresi keagamaan, serta dinamika komersialisasi ruang publik di Kota Sorong.

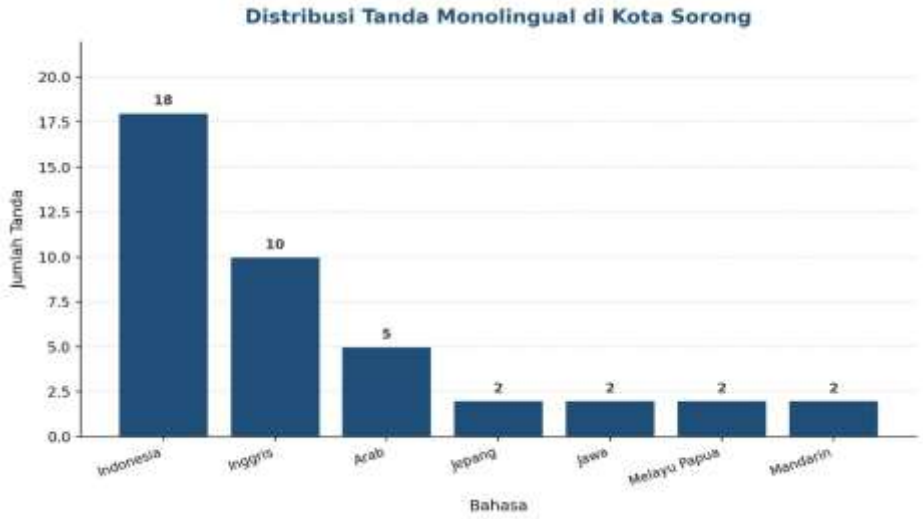


Diagram 1 Distribusi LL Monolingual

Kategori monolingual merupakan kelompok dengan jumlah tanda terbanyak (41 tanda), didominasi secara mutlak oleh bahasa Indonesia (18 tanda, 22,5%) sebagai penanda tunggal, diikuti bahasa Inggris (10 tanda, 12,5%) yang umumnya muncul pada tanda komersial (*branding*), sementara bahasa Arab (5 tanda) serta bahasa Jepang, Jawa, Melayu Papua, dan Mandarin (masing-masing 2 tanda) hadir dalam jumlah kecil sebagai penanda identitas keagamaan, historis, etnis, atau komunitas pendatang tertentu. Pola ini menegaskan dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ruang publik. Namun, pola ini juga memperlihatkan absennya visibilitas mandiri bahasa Moi sebagai bahasa daerah asli Kota Sorong dalam bentuk tanda monolingual.

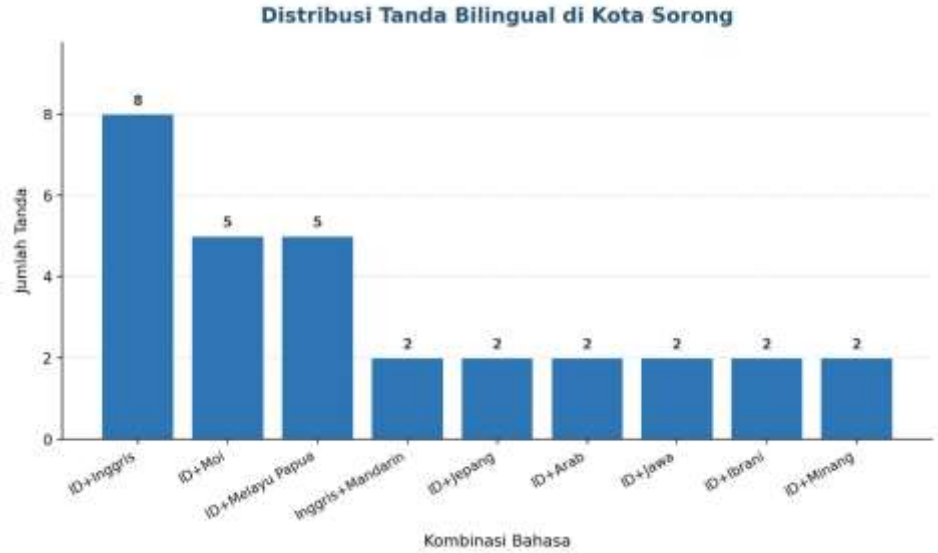


Diagram 2 Distribusi LL Bilingual

Kategori bilingual berjumlah 30 tanda dengan kombinasi paling dominan adalah Indonesia+Inggris (8 tanda, 10%), yang mencerminkan strategi ganda memenuhi kewajiban regulasi bahasa Indonesia sekaligus menyasar warga internasional. Menariknya, kombinasi Indonesia+Moi dan Indonesia+Melayu Papua sama-sama berjumlah 5 tanda (6,25%) yang menunjukkan bahwa visibilitas bahasa lokal justru muncul terutama dalam bentuk berdampingan dengan bahasa Indonesia (bukan berdiri

sendiri). Sementara itu, kombinasi lain seperti Inggris+Mandarin, Indonesia+Jepang, Indonesia+Arab, Indonesia+Jawa, Indonesia+Ibrani, dan Indonesia+Minang masing-masing hanya 2 tanda, mengindikasikan keragaman etnis pendatang yang turut mewarnai lanskap linguistik kota tetapi dengan visibilitas ruang publik yang rendah.

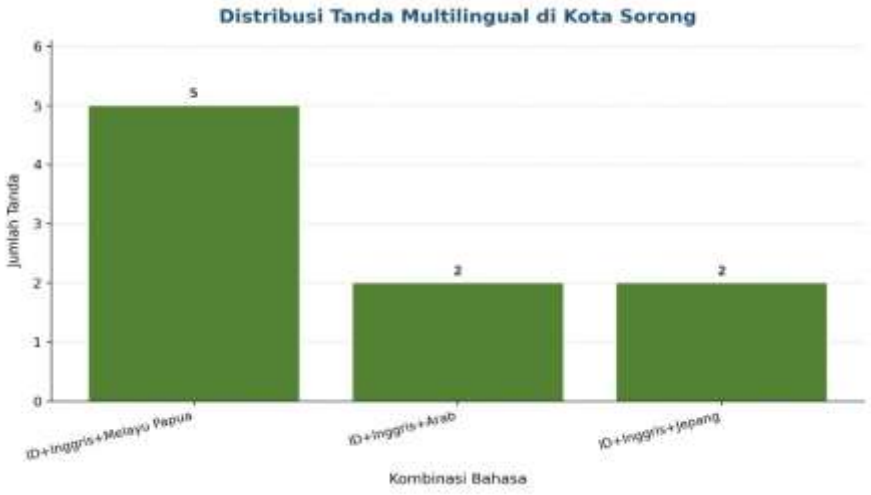


Diagram 3 Distribusi LL Multilingual

Kategori multilingual menjadi kelompok dengan jumlah tanda paling sedikit (9 tanda dari total 80), yang seluruhnya berbasis kombinasi Indonesia+Inggris sebagai inti, ditambah satu bahasa ketiga: Melayu Papua (5 tanda, 6,25%) sebagai kombinasi terbanyak yang mencerminkan tanda-tanda di ruang publik yang berupaya merangkul identitas nasional, internasional, dan lokal Papua sekaligus. Sementara itu, kombinasi Indonesia+Inggris+Arab dan Indonesia+Inggris+Jepang masing-masing hanya 2 tanda yang umumnya terkait fungsi keagamaan atau situs historis tertentu. Rendahnya jumlah tanda multilingual ini menunjukkan bahwa hierarki tampilan bahasa yang kompleks masih jarang diadopsi pengelola/pembuat tanda di ruang publik Kota Sorong.

(Zona Pemerintahan)



Gambar 1 *RSUD SeLe Be Solu Kota Sorong* LL Bilingual

Tanda LL tersebut terpasang pada fasad utama gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sorong (*top-down*), mewakili identitas resmi instansi pemerintah. Akronim sebagai penanda wilayah "R.S.U.D" (Rumah Sakit Umum Daerah) serta "KOTA SORONG" menggunakan bahasa Indonesia resmi. Sementara itu, kata *"SELE BE SOLU"* diambil dari bahasa Moi (bahasa daerah penutur asli tanah

Sorong/*indigenous language*) yang secara harfiah merujuk pada toponimi lokal (kawasan/wilayah tempat RSUD berdiri). Tanda LL tersebut memiliki fungsi informasional dan simbolik. Fungsi informasionalnya ialah mengidentifikasi nama institusi dan lokasi bangunan utama pelayanan kesehatan masyarakat. Fungsi simboliknya ialah mengangkat identitas kebudayaan dan kearifan lokal Suku Moi melalui nama *"Sele Be Solu"* sebagai bentuk pengakuan keberadaan suku asli di Kota Sorong.

Tanda LL tersebut sesuai UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019, yakni bahasa Indonesia diutamakan dalam papan nama gedung pemerintah. Penggunaan bahasa daerah disandingkan sebagai nama diri/toponimi tempat tanpa mengesampingkan identitas resmi bahasa negara ("RSUD Kota Sorong"). Pada tanda tersebut, penulisan akronim "R.S.U.D" menggunakan titik di setiap huruf (R.S.U.D) tidak baku. Menurut EYD V, singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata nama lembaga pemerintah atau institusi resmi ditulis kapital tanpa tanda titik (seharusnya ditulis RSUD).

Secara sosiolinguistis, penanda LL pada gedung RSUD ini merupakan contoh ideal integrasi kebijakan bahasa nasional dengan penghormatan kearifan lokal di Papua Barat Daya. Pemerintah Kota Sorong berhasil memperlihatkan fungsi simbolis pelestarian bahasa daerah (Moi) pada fasilitas umum utama tanpa mengabaikan fungsi informasional bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kesalahan kecil hanya terletak pada tipografi penulisan akronim yang belum sesuai EYD V.



Gambar 2 *VISI UNAMIN* LL Monolingual

Pada Gambar 2, bahasa Indonesia digunakan dalam LL fisik monolingual zona pemerintahan untuk menjelaskan visi salah satu universitas swasta milik Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Kota Sorong, yakni Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN). Visi UNAMIN merupakan pandangan, cita-cita, atau wawasan ke depan UNAMIN. Gambar 2 menunjukkan bahwa LL memiliki fungsi informasional tentang visi misi universitas. Adapun aktor pembuat tanda tersebut adalah lembaga pendidikan di bawah kemdiktisaintek sehingga termasuk bagian pihak otoritas *top-down*. Secara regulasi, penggunaan bahasa Indonesia pada tanda LL tersebut sudah baku dan sesuai kebijakan bahasa.



Gambar 3 *UMS mart* LL Monolingual Bahasa Inggris

Gambar 3 menunjukkan penggunaan monolingual bahasa Inggris pada nama toko di UNAMIN, *UMS mart*. Nama *UMS mart* terdiri atas dua kata UMS yang merupakan singkatan dari Universitas Muhammadiyah Sorong dan *mart* yang artinya pasar/toko. Aktor tanda LL tersebut adalah *top-down* kampus UNAMIN. Papan nama tersebut dipajang dengan ukuran besar di atas pintu toko, dan dicetak dengan huruf timbul. Menurut Cenoz dan Gorter (dalam Shohamy dan Gorter, 2009), penggunaan bahasa Inggris oleh pelaku usaha memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualannya sehingga bahasa Inggris dalam LL memiliki motivasi ekonomi atau nilai komersial. Penelitian Iye dkk. (2023) dan McDermott (2019) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris di ruang publik dapat dilihat sebagai cerminan dari pengaruh budaya Barat dan fenomena globalisasi di seluruh dunia terhadap penggunaan bahasa.

Sementara itu, merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019, bahasa Indonesia wajib digunakan pada merek dagang atau lembaga usaha yang dimiliki warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Karena *UMS mart* merupakan milik UNAMIN di bawah kemdiktisaintek/*top-down*, penggunaan bahasa Inggris monolingual ini tidak sejalan dengan peraturan tersebut. Secara fungsi simbolik, kampus belum mengutamakan bahasa Indonesia atau memiliki sikap positif bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa pada tanda nama toko.



Gambar 4 *Pos Security* LL Bilingual Bahasa Indonesia+Bahasa Inggris
Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 4 tanda LL *Pos Security* berada pada zona pemerintah, Kantor Wali Kota Sorong. Penanda dipasang pada fasilitas gedung pemerintah daerah (Kantor Wali Kota)

yang menandakan kebijakan resmi dari otoritas publik instansi terkait (*Top-Down*). Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata *"POS"* berasal dari bahasa Indonesia (serapan dari Belanda/Inggris), sedangkan kata *"SECURITY"* menggunakan bahasa Inggris (istilah baku Bahasa Indonesia untuk penanda ini adalah *Satpam* atau *Keamanan*). Tanda tersebut mengombinasikan frasa dua bahasa dalam satu penanda. Tanda tersebut berfungsi informasional, yaitu memberikan informasi petunjuk lokasi fasilitas layanan keamanan bagi pegawai maupun tamu kedinasan.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 36 dan Perpres No. 63 Tahun 2019 Pasal 33, lembaga/instansi pemerintah wajib mengutamakan pengunaan Bahasa Indonesia pada ranah pelayanan publik dan penunjuk arah di lingkungan fasilitas pemerintah. Penggunaan campur kode dengan diksi asing *"SECURITY"* pada frasa *"POS SECURITY"* tanpa menyertakan padanan bahasa Indonesia (*Pos Satpam*/*Pos Keamanan*) pada instansi pemerintah merupakan bentuk ketidakbakuan dan ketidakpatuhan terhadap pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

(Zona Komersial)



Gambar 5 *Good Mood* LL Bilingual Bahasa Indonesia+Inggris



Gambar 6 *Rice Box* LL Bilingual Bahasa Indonesia+Inggris

Gambar 5 dan 6 adalah tanda LL bilingual bahasa Indonesia+Inggris sebuah kedai makanan di area kampus. Nama kedua kedai tersebut *GOOD MOOD* dan *RICE BOX* menggunakan bahasa Inggris dan tulisan menu dan lainnya menggunakan campuran bahasa Indonesia+Inggris. Aktor tanda LL tersebut adalah *bottom-up* yakni dari pihak pribadi atau swasta. Kedua tanda LL tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa Inggris hanya digunakan oleh pelaku LL pribadi atau komersial. Hal ini sejalan dengan pendapat Leclerc (dalam Landry dan Bourhis, 1997) bahwa keberagaman bahasa

terdapat lebih banyak di *private signs* atau tanda milik pribadi (*bottom-up*). Ada asosiasi simbolis yang dieksploitasi oleh pelaku LL yang menggunakan bahasa asing (Spolsky, 2009). Cenoz dan Gorter (dalam Shohamy dan Gorter, 2009) mengemukakan bahwa dengan menggunakan bahasa Inggris, pelaku usaha memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualannya sehingga bahasa Inggris dalam LL memiliki motivasi ekonomi atau nilai komersial.

(Zona Historis dan Budaya)



Gambar 7 *Welcome to Goa Jepang 日本の洞窟へようこそ* LL Multilingual

Tanda LL *Welcome to Goa Jepang 日本の洞窟へようこそ* berada pada zona historis dan budaya sekaligus pariwisata. Tanda tersebut berfungsi sebagai gapura resmi situs wisata sejarah yang dikelola pemda/pengelola situs cagar budaya (*top-down*). Teksnya tersusun atas frasa pembuka *"Welcome To"* (bahasa Inggris), nama objek "Goa Jepang" (bahasa Indonesia), dan kalimat ucapan selamat datang dengan aksara Kanji/Hiragana *"日本の洞窟へようこそ"* (*Nihon no dōkutsu e yōkoso*, "Selamat datang di gua Jepang"). Tanda LL tersebut menampilkan tiga bahasa berbeda (Inggris, Indonesia, Jepang) dan dua sistem aksara (Latin dan Kanji/Hiragana) dalam satu penanda visual.

Tanda LL tersebut memiliki fungsi informasional dan simbolik. Fungsi informasionalnya ialah memberikan petunjuk identitas lokasi wisata sejarah (Goa Jepang) dan pesan ucapan selamat datang. Fungsi simboliknya ialah merekam jejak peninggalan Perang Dunia II Jepang di Pulau Doom serta daya tarik bagi wisatawan mancanegara (khususnya turis asal Jepang).

Frasa sapaan utama ("*Welcome*") hanya berbahasa Inggris tanpa padanan bahasa Indonesia yang setara (Selamat Datang). Bahasa Indonesia hanya muncul sebagai nama tempat ("Goa Jepang"), bukan sebagai kalimat sapaan penuh. Berdasarkan UU 24/2009 dan Perpres 63/2019, bahasa Indonesia semestinya diutamakan pada posisi paling atas atau paling dominan pada tanda ruang publik. Penggunaan kata "Goa" tidak sesuai dengan KBBI dan EYD Edisi V. Bentuk baku dari kata tersebut adalah "Gua".

(Zona Transportasi dan Pariwisata)



Gambar 8 *Bok Namu Selamat Jalan* di Pelabuhan PELNI



Gambar 9 *Bok Nefeden Selamat Datang* Bandara DEO

Pada Gambar 8 dan 9 tersebut, Gerbang Pelabuhan dan Bandara DEO Kota Sorong menampilkan ucapan salam khas Suku Moi, yaitu *"Bok Namu"* dan *"Bok Nefeden"*, yang disandingkan langsung dengan bahasa Indonesia. Pada pintu keluar terminal pelabuhan, ungkapan *"Bok Namu"* digunakan untuk menyampaikan pesan selamat jalan kepada para penumpang yang akan berlayar. Sementara itu, pada gerbang utama kedatangan Bandara DEO, frasa *"Bok Nefeden"* dipasang untuk menyambut setiap tamu dan warga yang baru saja mendarat di Tanah Papua, Kota Sorong.

Secara bahasa, kedua ungkapan dalam bahasa daerah Moi ini memiliki makna perpisahan dan penyambutan yang sangat hangat. Frasa *"Bok Namu"* berarti "Selamat Jalan", sedangkan *"Bok Nefeden"* berarti "Selamat Datang". Penggunaan istilah asli daerah di dua titik transportasi utama ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk arah atau informasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan bahasa ibu (*indigenous language*) Suku Moi sebagai penutur asli di wilayah Sorong.

Penataan bahasa pada kedua gerbang ini menunjukkan bentuk penghormatan yang tinggi terhadap kearifan lokal tanpa mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Penulisan frasa Bahasa Indonesia pada kedua gerbang juga sesuai dengan standar EYD V dan KBBI. Dengan memadukan tulisan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara serasi, pemerintah daerah berhasil menjaga kelestarian budaya lokal di ruang publik. Kehadiran tulisan ini memberi kesan pertama yang mendalam bagi para wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Sorong sebagai pintu gerbang utama di Papua Barat Daya.

(Zona Komersial)



Gambar 10 *Sego Ndok Kriwil*

Spanduk usaha kuliner ini menampilkan nama menu *"Sego Ndok Kriwil"* yang disandingkan dengan keterangan harga *"15 Ribu"*. Penggunaan istilah ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu *"Sego"* berarti nasi, *"Ndok"* berarti telur, dan *"Kriwil"* merujuk pada tekstur telur goreng yang keriting. Penulisan nama menu tersebut digabungkan dengan bahasa Indonesia untuk memberikan informasi harga yang mudah dipahami oleh pembeli.

Secara sosiolinguistis, pilihan kata berbahasa Jawa ini berfungsi sebagai penanda identitas kuliner sekaligus strategi pemasaran (Penjenamaan/*branding*). Dengan mencantumkan nama khas daerah, pemilik usaha ingin menarik perhatian konsumen serta menegaskan cita rasa masakan tradisional yang ditawarkan. Penanda ini dibuat secara mandiri oleh pemilik usaha (*bottom-up*) untuk tujuan komersial di ruang publik.

Kehadiran spanduk berunsur bahasa Jawa di Kota Sorong mencerminkan keanekaragaman budaya dan demografi masyarakatnya yang heterogen. Pembauran bahasa daerah dari luar Papua pada papan usaha komersial menunjukkan bagaimana bahasa digunakan secara adaptif untuk berinteraksi dan menggerakkan roda ekonomi lokal di Papua Barat Daya.



Gambar 11 *Lapau Sikumbang 1 Masakan Padang*

Pada Gambar, tanda LL tersebut menampilkan dua variasi bahasa, yakni Indonesia dan Minang. Adapun teks "MASAKAN PADANG" menggunakan bahasa Indonesia. Teks "LAPAU SIKUMBANG" menggunakan campuran bahasa Minang ("Lapau" berarti warung)

dan nama suku Minang ("Sikumbang"). Tanda ini dibuat oleh pemilik usaha warung makan (*bottom-up*), bukan oleh otoritas pemerintah atau instansi resmi.

Tanda tersebut berfungsi informasional, yakni memberitahukan nama tempat usaha "Lapau Sikumbang 1" dan jenis produk yang dijual "Masakan Padang". Selain itu, tanda tersebut juga berfungsi simbolik, yakni penggunaan kata "Lapau" dan gambar latar Rumah Gadang serta penari Minang membangun identitas budaya yang kuat, keaslian rasa, dan prestise etnis. Meskipun ada regulasi (*top-down*) yang mewajibkan keutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, pelaku usaha (*bottom-up*) cenderung memprioritaskan bahasa daerah yang memiliki nilai simbolis kuat untuk menegaskan identitas etnis dagangannya.



Gambar 12 *BING XUE*

Papan menu pada gerai minuman dan es krim *Bing Xue* ini didominasi oleh penggunaan bahasa Inggris dan penulisan Pinyin Mandarin. Nama merek utama ditulis menggunakan Pinyin *BING XUE* (*冰雪*), sedangkan seluruh daftar kategori serta varian produk (*Egg Waffle*, *Fresh Ice Cream*, hingga *Brown Sugar Bubble Milk Tea*) ditulis penuh dalam bahasa Inggris. bahasa Indonesia hanya muncul secara sangat terbatas pada istilah lokal seperti *Klepon Latte*.

Secara sosiolinguistik, pilihan bahasa ini merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk membangun citra merek yang modern, kekinian, dan berstandar internasional. Pengelola usaha (*bottom-up*) sengaja memanfaatkan bahasa Inggris sebagai daya tarik komersial di ruang publik. Selain itu, penulisan harga juga menggunakan notasi populer huruf "K" (seperti 18K atau 8K) yang menggantikan penulisan *ribu*.

Penggunaan bahasa asing yang sangat dominan ini mencerminkan fenomena globalisasi bahasa pada zona komersial di Kota Sorong. Meskipun efektif untuk menarik minat konsumen muda, penataan bahasa pada papan menu ini mengesampingkan pengutamaan bahasa Indonesia sehingga menunjukkan bagaimana kepentingan bisnis swasta sering kali lebih memprioritaskan bahasa asing dibanding bahasa negara. Pelaku usaha secara sengaja memilih bahasa Inggris sebagai *lingua franca* komersial untuk menampilkan kesan keren, modern, dan internasional.

(Zona Transportasi dan Pariwisata)



Gambar 13 *Vega Prime Hotel*

Papan petunjuk jalan dan fasilitas milik *Vega Prime Hotel & Convention* di Kota Sorong ini didominasi oleh penggunaan bahasa Inggris. Tulisan header utama *"FACILITIES"* serta seluruh rincian layanan—seperti *"Convention Hall"*, *"Swimming Pool"*, hingga *"Executive Lounge"*—ditulis penuh dalam Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia hanya digunakan secara terbatas pada petunjuk arah pintu masuk (*"MASUK"*) serta penanda lokasi *"Sorong - Indonesia"*.

Secara sosiolinguistis, pilihan bahasa ini merupakan bentuk komodifikasi bahasa asing dalam industri perhotelan dan pariwisata. Pihak pengelola hotel swasta (*bottom-up*) secara sengaja menggunakan bahasa Inggris untuk membangun citra tempat penginapan

yang mewah, profesional, dan berstandar internasional. Mulyawan dkk. (2022) menyatakan bahwa banyak atau sedikitnya papan tanda (*signage*) yang menggunakan bahasa Inggris dipengaruhi oleh status suatu destinasi wisata. Hal ini disesuaikan dengan posisi Kota Sorong sebagai pintu gerbang utama bagi para wisatawan mancanegara maupun pebisnis.

Namun, dominasi penuh bahasa Inggris pada papan luar ruang ini belum sejalan dengan regulasi pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Berdasarkan Perpres No. 63/2019, papan penunjuk fasilitas umum idealnya wajib mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum disandingkan dengan bahasa asing. Papan ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor komersial pariwisata lebih menonjolkan fungsi simbolis bahasa Inggris dibanding kepatuhan regulasi bahasa negara.

(Zona Komersial)



Gambar 14 *Apotek Sehat Beth-EL*

Papan nama *Apotek Sehat Beth-EL* di Kota Sorong ini menampilkan penulisan bahasa Indonesia baku yang dipadukan dengan istilah bernuansa keagamaan. Teks jenis usaha *"Apotek Sehat"* menggunakan Bahasa Indonesia yang tepat sesuai kaidah ejaan. Sementara itu, nama *"Beth-EL"* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani (בֵּית אֵל - *Bêt ʾĒl*, yang berarti *Bêt* "Rumah" dan *ʾĒl* "Tuhan/Allah") yang secara harfiah memiliki arti "Rumah Tuhan" atau "Bait Allah".

Secara sosiolinguistis, pemilihan nama *"Beth-EL"* membawa fungsi simbolis dan identitas kebudayaan religius yang cukup kuat. Pihak pemilik usaha swasta (*bottom-up*) sengaja menyisipkan unsur keagamaan tersebut untuk memberikan kesan spiritual, rasa aman, serta membangun kedekatan emosional (agama mayoritas) dan kepercayaan bagi masyarakat di Kota Sorong. Unsur ini berpadu serasi dengan fungsi informasional tempat pelayanan kefarmasian publik.

Penataan bahasa pada papan nama komersial ini juga tergolong patuh terhadap regulasi pengutamaan bahasa negara. Berdasarkan Perpres No. 63/2019, papan usaha swasta tetap diwajibkan mengutamakan bahasa Indonesia. Pemilik apotek secara tertib menempatkan frasa baku bahasa Indonesia (*"Apotek Sehat"*) di posisi atas, sehingga menjadi teladan yang baik dalam menjaga identitas bahasa negara di ruang publik tanpa mengesampingkan ekspresi sosial-budaya lokal.



Gambar 15 *Selamat Datang Onomi Fhoka* di Indomaret



Gambar 16 *Terima Kasih Helem Foi* di Indomaret

Gambar LL pada penanda komersial ritel Indomaret tersebut menampakkan pola multilingualisme bertingkat yang mengombinasikan bahasa Indonesia, bahasa daerah Papua (Sentani), dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mendominasi hierarki visual pada posisi teratas dengan ukuran huruf terbesar (*"SELAMAT DATANG"* dan *"TERIMA KASIH"*) sebagai media penyampai informasi utama. Kehadiran frasa bahasa lokal (*"ONOMI FHOKA"* dan *"HELEM FOI"*) diletakkan tepat di bawah teks bahasa Indonesia untuk menjalankan fungsi simbolis dalam merepresentasikan identitas budaya lokal. Sementara itu, penggunaan bahasa Inggris hadir terbatas pada istilah teknis promosi digital (*"SCAN DI SINI!"*, *"App Store"*, *"Google Play"*) guna menyelaraskan layanan dengan fitur teknologi modern.

Secara sosiolinguistis, penggunaan bahasa oleh aktor swasta (*bottom-up*) ini mencerminkan strategi lokalisasi budaya (*cultural localization*) di zona komersial. Pelaku usaha ritel nasional tidak hanya mematuhi prinsip pengutamaan bahasa negara sebagai bahasa resmi, tetapi juga mengintegrasikan bahasa daerah untuk membangun kedekatan emosional (*sense of belonging*) dengan masyarakat setempat. Integrasi ini menunjukkan kontestasi bahasa yang seimbang di ruang publik, ketika fungsi informasional, penjenamaan modern, dan kelestarian kearifan lokal saling melengkapi.

Simpulan

Penelitian ini berhasil memetakan pola distribusi bahasa pada lanskap linguistik (LL) Kota Sorong melalui 80 tanda yang dianalisis, yang menunjukkan dominasi penanda monolingual (51,25%) dibandingkan bilingual (37,5%) dan multilingual (11,25%), dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa paling dominan pada kategori tunggal. Dari sisi aktor dan fungsi, tanda-tanda yang dibuat oleh otoritas pemerintah (*top-down*) cenderung mengutamakan bahasa Indonesia sesuai regulasi, sementara tanda-tanda

milik pelaku usaha swasta (*bottom-up*) lebih banyak memanfaatkan bahasa asing, khususnya Inggris, sebagai strategi komersial dan pencitraan modernitas. Temuan ini juga mengungkap bahwa bahasa daerah (*indigenous language*), bahasa Moi sebagai bahasa asli Kota Sorong dan bahasa Sentani, memiliki visibilitas yang rendah dan hampir selalu muncul berdampingan dengan bahasa Indonesia, bukan berdiri sendiri sebagai penanda monolingual, sehingga menegaskan posisi marginalnya di ruang publik meskipun terdapat beberapa contoh yang menonjolkan identitas kearifan lokal, seperti pada penanda RSUD *sele be solu*, sapaan *bok namu/bok nefeden* di pelabuhan dan bandara, dan *onomi fhoka/helem foi* di Indomaret.

Terkait kebijakan bahasa, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan terhadap UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019 masih bervariasi antarzona dan antaraktor pembuat tanda. Instansi pemerintah pada umumnya relatif patuh dalam mengutamakan bahasa Indonesia, meski masih ditemukan kesalahan tipografi dan penggunaan istilah asing tanpa padanan bahasa Indonesia pada beberapa fasilitas publik. Sebaliknya, sektor komersial dan pariwisata (swasta dan perhotelan) menunjukkan kecenderungan mengesampingkan bahasa Indonesia demi membangun citra internasional dan menarik minat konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan bahasa negara dan praktik nyata di ruang publik, sekaligus menegaskan bahwa dinamika LL Kota Sorong mencerminkan kompetisi antara kepentingan identitas nasional, pelestarian bahasa lokal, dan motivasi ekonomi global. Studi ini memiliki keterbatasan pada cakupan empat zona strategis dan jumlah sampel tanda yang terbatas sehingga generalisasi terhadap keseluruhan ruang publik Kota Sorong perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan zona dan mengkaji lebih mendalam persepsi masyarakat terhadap kebijakan bahasa tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota tim peneliti atas kerja sama, dedikasi, dan kontribusinya dalam pelaksanaan penelitian ini, mulai dari tahap pengumpulan data di lapangan hingga proses analisis dan penulisan artikel. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) atas dukungan pendanaan melalui skema Hibah Kompetitif Nasional BIMA, yang telah memungkinkan terlaksananya penelitian ini secara menyeluruh. Terima kasih juga kepada Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) UNAMIN atas fasilitasi, dukungan administratif, serta bimbingan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.

Referensi

Andriani, Y. Y., & Adelia, S. (2025). Linguistic Landscape in Goa Jepang Binsari Biak Papua. *Language Horizon: Journal of Language Studies*, *13*(1), 22-32.

Andriyanti, E. (2019). Linguistic landscape at Yogyakarta‟s senior high schools in multilingual context: Patterns and representation. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 9(1), 85-97. https://doi.org/10.17509/ijal.v9i1.13841

Artawa, K., Mulyawan, I. W., Satyawati, M. S., & Erawati, N. K. R. (2020). Balinese in public spaces (A linguistic landscapes study in Kuta Village). *Journal of Critical Reviews*, *7*(7), 6–10. https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.02

Backhaus, P. (2006). Multilingualism in tokyo: A look into the linguistic landscape. International Journal of Multilingualism, 3(1), 52-66. https://doi.org/10.1080/14790710608668385

Benu, N. N., Artawa, I. K., Satyawati, M. S., & Purnawati, K. W. (2023). Local language vitality in Kupang city, Indonesia: A linguistic landscape approach. *Cogent Arts & Humanities*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/ 23311983.2022.2153973

Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M.H., & Trumper-Hecht, N. (2006). Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel. In D. Gorter (ed.), *Linguistic landscape: A new approach to multilingualism* (pp. 7-30). Clevedon: Multilingual Matters.

Cai, H. (2025). Testing the waters: a nationwide survey of signage language policies in Australia. Current Issues in Language Planning, 1-24. https://doi.org/10.1080/14664208.2025.2556078

Du Plessis, T. (2011). Language policy, language visibility and the standardisation of geographical names in South Africa–the quest for coherency. *Lang. Matters 42 (2), 264–281*. https://doi.org/10.1080/10228195.2011.618844

Eliza, A. N., Hadiutomo, D. A., & Faiza, E. (2025). A Linguistic Landscape Study in Kya Kya Surabaya, Indonesia. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, *8*(1), 36-45.

Fakhiroh, Z., & Rohmah, Z. (2018). Linguistic Landscape In Sidoarjo City. *NOBEL: Journal of Literature and Language Teaching*, *9*(2), 96-116.

Fakhiroh, Z., & Rohmah, Z. (2018). Linguistic landscape in Sidoarjo city. NOBEL: Journal of Literature and Language Teaching, 9(2), 96-116. https://doi.org/10.15642/NOBEL.2018.9.2.96-116

Febriansyah, R., Santoso, T., & Zeyhudan, A. (2025). Eksplorasi Lanskap Linguistik: Potret Keberlangsungan Bahasa Lokal dalam Modernitas Area Wisata di Manokwari. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, *11*(2), 1681-1695.

Gorter, D., Aiestaran, J., Cenoz, J., (2012). The Revitalization of Basque and the Linguistic Landscape of Donostia-San Sebasti´an, Minority Languages in the Linguistic Landscape. Palgrave Macmillan UK, London, pp. 148–163.

Gorter, D. (2018). Linguistic landscapes and trends in the study of schoolscapes. *Journal of Linguistic and Education, 44, 80–85. https://doi.org/10.1016/j.linged.2017.10.001*

Ibrahim, I., Lukman, G., Gusnawaty, G., & Iswary, E. (2023). The Moi language's maintenance level and transmission pattern in Sorong, Southwest Papua. The *Seybold Report, 18(08)*, 847-856. https://seyboldreport.org/article_overview?id=MDgyMDIzMDMyNTA1NTU1MzI3

Ibrahim, I., Saputra, D., & Hardianti, R. (2024). Vitality of Moi Language: A Case Study of Moi Tribes in Southwest Papua, Indonesia. *Theory and Practice in Language Studies*, *14*(12), 3906-3915. https://doi.org/10.17507/tpls.1412.26

Iye, R., Simpen, I. W., Sedeng, I. N., Netra, I. M., Said, I. M., & Abida, F. I. N. (2023). Language contextualization in public space in Maluku Province: A landscape linguistics study. *Cogent Arts & Humanities, 10(1), 1-21*. https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2247648

Jiao, W., & Singh, M. K. M. (2024). Linguistic landscape in George Town, Malaysia: a comparison of thematic areas. *Ampersand*, 13, 100202. https://doi.org/10.1016/j.amper.2024.100202

Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language & Social Psychology*, *16*(1), 23–49. https://doi.org/10.1177/ 0261927X970161002

McDermott, A. (2019). The Linguistic Landscape of Post-Soviet Bishkek. *Region*, 8(2), 227-256. https://doi.org/10.1353/reg.2019.0013

Mulyawan, I. W. (2020). Reading visual design of outdoor signs in Kuta (A case study of multimodal linguistic landscapes). *Cogent Arts & Humanities*, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1748987

Mulyawan, I. W., Paramarta, I. M. S., & Suparwa, I. N. (2022). Language contestation at Batukau Temple, Bali (a linguistic landscape study). *Cogent Arts & Humanities*, *9*(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2090651

Putra, V. G. R., Novela, F., & Busri, H. (2024). Linguistic landscape study: signs of public transportation places in Sidoarjo regency. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, *7*(1), 163-174.

Rohmah, Z., Basthomi, Y., & Sholihah, D. N. (2024). Muslim majority yet without preference for Arabic: Mapping Linguistic Landscape Studies in Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *13*(3), 600-610.

Sakhiyya, Z., & Martin-Anatias, N. (2020). Reviving the language at risk: a social semiotic analysis of the linguistic landscape of three cities in Indonesia. *International Journal of Multilingualism,* 20(2), 290-307. https://doi.org/10.1080/14790718.2020.1850737

Savski, K. (2021). Language policy and linguistic landscape: Identity and struggle in two southern Thai spaces. *Linguistic Landscape*, *7*(2), 128-150.

Shohamy, E., & Gorter, D. (2009). *Linguistic Landscape Expanding the Scenery*. Routledge.

Shohamy, E. (2015). LL research as expanding language and language policy. *Linguistic Landscape*, 1(1-2), 152-171. https://doi.org/10.1075/ll.1.1-2.09sho

Shohamy, E., & Gorter, D. (Eds.). (2009). Linguistic landscape: Expanding the scenery. New York: Routledge.

Spolsky, B. (2009) "Rescuing Maori: the last 40 years", *Language Documentation and Description* 6, 11-36. https://doi.org/10.25894/ldd237

Taryono, M. R., & Tambunan, W. (2024). Pemilihan bahasa siswa sekolah dasar pada masyarakat multibahasa dalam ranah keluarga. *Jurnal Peradaban Melayu*, *19*(2), 24-29. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol19.2.3.2024

Taryono, M. R., Elfiti, R. P. I., & Tambunan, W. (2025). Vitalitas bahasa daerah pada siswa sekolah dasar dalam masyarakat multietnis. Cakrawala Linguista, 8(1), 20-27. http://dx.doi.org/10.26737/cling.v8i1.6579

Tufi, S., Ledgeway, A., Lepschy, A. (2010). Degrees of visibility of immigrant communities in the linguistic landscape of Genoa and Cagliari, Into and Out of Italy: Lingua e cultura della migrazione italiana. *Perugia, Guerra*, p. 31.

Wu, H. & Techasan, S. (2016). Chinatown in Bangkok: the multilingual landscape. Manusya Journal of Humanities, 19(3), 38-52.

Yendra, Y., & Artawa, K. (2020). *Lanskap Linguistik: Pengenalan, Pemaparan, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Zhang, H., Seilhamer, M. F., & Cheung, Y. L. (2024). When the evening lights are lit: exploring the linguistic landscape of Singapore's Chinatown at night. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, *45*(4), 1152–1170. https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1950165